

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

2025

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Jl.Syeh

Nawawi

Albantani - Serang

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk melakukan perencanaan kegiatan pada perubahan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja.

Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja P) tahun 2025 sebagai salah satu dokumen perencanaan yang menjadi salah satu acua dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun rencana.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Dokumen Renja Perubahan 2025 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Dokumen Renja Perubahan 2025 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Serang, Juni 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**



TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	III-1
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN	III-1
3.2. INDIKATOR KEGIATAN	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan) tahun 2025 pada Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan untuk penganggaran pada triwulan III (tiga) atau periode akhir tahun yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam Penyusunan dokumen ini termuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II (dua).

Dimana dalam penyusunan Renja Perubahan ini perlu disampaikan analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Banten, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II (dua) tahun 2025 dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Maka dalam rangka penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Banten perlu melihat laporan realisasi fisik dan keuangan pada periode triwulan II (dua), sebagai bahan evaluasi dan penyelesaian kendala serta masalah agar tidak terjadi pada pelaksanaan di triwulan III (tiga) dan IV (empat).

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2025 Perubahan ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Permenhub nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Permenhub Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2004 Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan Angkutan Lalu Lintas;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun Tahun 2015 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Banten;
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan ata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan,

sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2025 sebagai berikut:

1. **BAB I PENADAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

2. **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TRIWULAN II**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan Ke II.

3. **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kerja berupa rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

4. **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi dengan indikator kinerja berupa:
 - 1) Rasio Konektifitas Provinsi
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
 - 3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan
2. Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan dengan indikator berupa Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target 70-80.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

NO	URAIAN	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya saing secara Merata dan Berkeadilan			
1	Daerah	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
2	Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatnya kinerja pelayanan, penyediaan sarana, prasarana, dan keselamatan perhubungan
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
1	Daerah	Mewujudkan Tata	Meningkatnya

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	URAIAN	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
		Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	kinerja pelayanan pemerintahan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2	Perangkat Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan bidang perhubungan Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan bidang perhubungan

Sumber: Renstra Dishub 2023-2026

Tujuan dan sasaran berdasarkan indikator tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Yang Baik dan Bersih					
	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	%
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%
			Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	100	%
			Meningkatnya Kualitas	100	%

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
			Pelayanan Publik		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1	dokumen

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	96	orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	1	Laporan

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN	10	Orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dokumen

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
			Elektronik pada SKPD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	unit
		Pengadaan Meubel	Tersedianya Mebel yang Disediakan	1	Paket
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45	Unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110	Unit
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	1	paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	4	paket
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	1	unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kantor (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	12	laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	12	Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	10	Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26	Unit
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis					

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
	Meningkatnya kinerja pelayanan, penyediaan sarana, prasarana, dan keselamatan perhubungan				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100%	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	dokumen
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		100%	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	9	Unit
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1330	Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	10	Unit

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	62	Unit
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		100%	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	Dokumen
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100%	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	Laporan
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	TerlaksananyaP erengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	300	Unit
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi		100%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Laporan
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	Laporan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	
		Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Banten	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraa n Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1	Laporan

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Managemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	1	Laporan
		Pembangunan Rute Aman Sekolah (RASS)	Tersedianya kawasan pembangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun.	1	Unit
		Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Tersedianya lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi.	1	Dokumen
		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS).	15	Lokasi
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan KeTersediaan	3	Laporan

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sarsaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.	100	Unit
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	100%	
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi.	3	Dokumen

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Target	Satuan
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		100%	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	unit
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	100%	
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		100%	
		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	4	dokumen

Sumber: Dinas Perhubungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2025 memiliki sedikit perbedaan pada tahun 2023, hal ini diakibatkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 tahun 2021 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15 -1317 tahun 2023, dimana terdapat beberapa Sub Kegiatan serta kode rekening perlu melakukan penyesuaian.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah Merumuskan Program dan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, untuk lebih jelas mengenai program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) :
 9. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
 11. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;

13. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi;
14. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
15. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

III. Program Pengelolaan Pelayaran :

16. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi ;
17. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian :

1. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.

3.2. INDIKATOR KEGIATAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2023-2026 yaitu:

- A. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
 - 1) Penanganan kemacetan yang perlu penanganan secara serius dan intens;

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

- 2) Pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan pemeliharaan/penggantian;
 - 3) Pemenuhan Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
 - 4) Pengembangan sarana angkutan umum massal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
 - 5) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di perkotaan Serang Metropolitan Area (SMA);
 - 6) Pembangunan Terminal Tipe-B;
 - 7) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- B. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Berwibawa.**

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				90.559.929.822	APBD			92.207.780.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	Provinsi Banten	100	365.175.770	APBD		100 %	38.934.519.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Provinsi Banten	100	400.000.000	APBD		100 %	420.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Provinsi Banten	3	110.000.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	Provinsi Banten	1	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok)	Provinsi Banten	1	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Banten	1	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Banten	1	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Provinsi Banten	3	100.000.000	APBD		3 Laporan	160.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Provinsi Banten	6	150.000.000	APBD		6 Laporan	120.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	Provinsi Banten	100	26.204.000.000	APBD		100 %	28.603.899.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Provinsi Banten	102	25.432.255.000	APBD		102 Orang/ Bulan	27.832.154.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	Provinsi Banten	1	604.830.000	APBD		1 Dokumen	604.830.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Provinsi Banten	1	88.325.000	APBD		1 Dokumen	88.325.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Provinsi Banten	1	1.150.000	APBD		1 Laporan	1.150.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Provinsi Banten	1	34.971.000	APBD		1 Dokumen	34.971.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Provinsi Banten	12	34.944.000	APBD		12 Laporan	34.944.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Provinsi Banten	1	7.525.000	APBD		1 Dokumen	7.525.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Provinsi Banten	100	9.500.000	APBD		100 %	100.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dok)	Provinsi Banten	1	9.500.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (%)	Provinsi Banten	100	53.000.000	APBD		100 %	100.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Provinsi Banten	1	53.000.000	APBD		100 Unit	50.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Provinsi Banten	-	-			1 Paket	50.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)	Provinsi Banten	100	530.272.000	APBD		100 %	1.036.870.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Provinsi Banten	-	-			12 Paket	480.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Provinsi Banten	5	285.000.000	APBD		5 Paket	189.584.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Provinsi Banten	4	31.000.000	APBD		4 Paket	65.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Provinsi Banten	12	32.000.000	APBD		12 Laporan	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Provinsi Banten	12	152.272.000	APBD		12 Laporan	202.286.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	Provinsi Banten	1	30.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Provinsi Banten	100	300.000.000	APBD		100 %	100.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Provinsi Banten	77	300.000.000	APBD		77 Unit	100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Provinsi Banten	100	8.194.632.800	APBD		100 %	8.473.750.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Provinsi Banten	12	600.470.400	APBD		1 Laporan	973.750.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Provinsi Banten	12	7.594.162.400	APBD		12 Laporan	7.500.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Provinsi Banten	100	1.138.000.000	APBD		100 %	100.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Provinsi Banten	67	848.000.000	APBD		67 Unit	40.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Provinsi Banten	74	50.000.000	APBD		74 Unit	30.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Provinsi Banten	2	240.000.000	APBD		2 Unit	30.000.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Provinsi Banten		28.926.874.200	APBD			31.732.781.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (%)	Provinsi Banten	100					
		Persentase pelaksanaan MRL dan penyediaan, pemeliharaan jalan (%)	Provinsi Banten	100					
		Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (%)	Provinsi Banten	100					

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (%)	Provinsi Banten	100					
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (%)	Provinsi Banten	100					
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (%)	Provinsi Banten	100					

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan (%)	Provinsi Banten	50	500.000.000	APBD		50 %	1.000.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	Provinsi Banten	2	300.000.000	APBD		2 Dokumen	400.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Dokumen)	Provinsi Banten	2	200.000.000	APBD		2 Dokumen	600.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Laporan)	Provinsi Banten	2	-				

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi (%)	Provinsi Banten	75	21.357.114.200	APBD	Perlu di Rasionalisasikan Lagi	100 %	3.364.923.697
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	Provinsi Banten	11	8.521.000.000	APBD		2 Unit	200.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	Provinsi Banten	9	9.161.237.958	APBD		4 Unit	1.804.923.697

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	Provinsi Banten	4	176.348.200	APBD		5 Unit	1.000.000.000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Provinsi Banten	9	3.498.528.042	APBD		5 Unit	360.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase pengeloaan terminal tipe B (%)	Provinsi Banten	100	200.000.000	APBD		100 %	10.950.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	Provinsi Banten	1	200.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	Provinsi Banten	-	-	APBD		1 Unit	10.700.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan (%)	Provinsi Banten	15	2.900.260.000	APBD		15 %	6.983.337.303
	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jala dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan (Unit)	Provinsi Banten	2	500.000.000	APBD		4 Unit	4.458.077.303

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	Provinsi Banten	5	500.000.000	APBD		5 Dokumen	500.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	Provinsi Banten	5	1.800.260.000	APBD		5 Laporan	1.800.260.000
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	Provinsi Banten	1	100.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	Provinsi Banten		-				25.000.000
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (%)	Provinsi Banten		2.530.000.000	APBD		100 %	620.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Provinsi Banten	1	50.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Provinsi Banten	8	2.400.000.000	APBD		1 Unit	300.000.000
	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Provinsi Banten	1	80.000.000	APBD		1 unit	120.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan Pada Terminal Tipe B	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Provinsi Banten	1	-			1 Laporan	100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan angkutan massal (%)	Provinsi Banten	10	1.439.500.000	APBD		10 %	8.814.520.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	Provinsi Banten	2	1.439.500.000	APBD		4 Unit	8.814.520.000
	Program Pengelolaan Pelayaran		Provinsi Banten		1.209.000.000	APBD			20.220.480.000
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (%)	Provinsi Banten						

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (%)	Provinsi Banten						
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan dan pengawasan kepelabuhanan (%)	Provinsi Banten	100	725.000.000	APBD		100 %	1.045.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	Provinsi Banten	2	-	APBD		2 Unit	300.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Laporan)	Provinsi Banten	3	725.000.000	APBD		3 Laporan	745.000.000
	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Presentase pembangunan, penerbitan izin Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional (%)	Provinsi Banten	100	484.000.000	APBD		100 %	19.175.480.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian (Unit)	Provinsi Banten	1	484.000.000	APBD		1 Unit	19.175.480.000
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (%)	Provinsi Banten	3	1.200.000.000	APBD		50 %	1.320.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan perkeretaapian (%)	Provinsi Banten	100	1.200.000.000	APBD		50 %	1.320.000.000,0

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	Provinsi Banten	1	1.200.000.000	APBD		15 Dokumen	1.320.000.000,0

Sumber: Dinas Perhubungan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sebagai visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat “community Base Development” (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.